

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB (*United Nations*) adalah Organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II oleh 51 negara yang berkomitmen untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa dan mempromosikan kemajuan sosial, standar hidup yang lebih baik dan hak asasi manusia.

PBB sendiri memiliki 4 tujuan utama, yaitu: untuk menjaga perdamaian di seluruh dunia, untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, untuk membantu negara-negara bekerjasama, untuk meningkatkan kehidupan orang-orang miskin, untuk menaklukan kelaparan, penyakit dan buta huruf, dan untuk mendorong penghormatan terhadap hak asasi dan kebebasan masing-masing; menjadi pusat harmonisasi tindakan negara untuk mencapai tujuan tersebut. Karena karakter internasional yang unik, dan kekuatan berada di tangan piagam pendirinya, organisasi ini dapat mengambil tindakan pada berbagai isu dan menyediakan forum bagi 193 negara anggota untuk mengekspresikan pandangan mereka, melalui majelis umum, dewan keamanan, dewan ekonomi dan sosial dan badan-badan komite lain.

Karya PBB mencapai setiap sudut dunia, Meskipun dikenal untuk pemeliharaan perdamaian, pembangunan perdamaian, pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan, ada banyak cara lain PBB dan sistemnya (badan-badan khusus, dana dan program) mempengaruhi kehidupan kita dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Organisasi ini bekerja pada berbagai masalah mendasar, dari pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan perlindungan pengungsi, bantuan bencana, terorisme, perlucutan senjata dan non-poliferasi, mempromosikan demokrasi, HAM, kesetaraan gender dan kemajuan perempuan, pemerintahan ekonomi, dan pembangunan sosial dan kesehatan Internasional, membersihkan ranjau darat, perluasan produksi pangan dan lebih, dalam rangka mencapai tujuan dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk dunia lebih aman dan generasi masa depan.¹

PBB di Indonesia memiliki 21 organisasi, yang memiliki mandat khusus dan bidang kerja tertentu, yang seringkali fokus pada pembangunan sosial dan tanggap bencana. Organisasi-organisasi PBB telah menjalin kemitraan dengan pemerintah dan rakyat Indonesia untuk mendukung usaha-usaha nasional mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs), Menyelamatkan jiwa manusia saat terjadi bencana dan menjawab tantangan-tantangan pembangunan yang berpusat pada manusia dalam negara berpenghasilan menengah yang sedang tumbuh dengan cepat.²

¹<http://www.un.org/en/aboutun> (diakses pada 12, September 2013)

²<http://www.un.or.id/id> (diakses pada 15, September 2013)

United Nations Development Programme (UNDP) adalah pengembangan organisasi PBB, dengan fokus pada lima bidang tertentu. UNDP adalah penyedia hibah terbesar PBB bagi pembangunan manusia. Hal ini didasarkan pada penggabungan perserikatan bangsa *Expanded Amerika* program bantuan teknis, yang diciptakan pada tahun 1965 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNDP memiliki fungsi sebagai koordinator tersebut, UNDP berusaha memastikan penggunaan paling efektif dari PBB dan sumber daya bantuan internasional. Apa yang ingin dicapai oleh UNDP, yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua yang mana telah lebih konkret didefinisikan melalui *Millennium Development Goals (MDGs)*.³

UNDP bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam pencapaian millennium. Adapun dana yang didapat baik dari bantuan luar negeri serta dana otonomi khusus (Otsus) yang mana selama ini diberikan namun tidak dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Papua. Pokok pemikiran dari otonomi daerah itu sendiri adalah menyangkut bagaimana upaya negara untuk menyejahterahkan rakyat.⁴ Kenyataan bahwa otonomi daerah dan pelimpahan kewenangan kepada daerah dilakukan dengan setengah hati. Dan Otonomi Daerah saat ini berada dipersimpangan jalan. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang setengah hati dan di persimpangan jalan tentu saja harus dikembalikan ke koridor yang sesungguhnya. Untuk inilah, peran lembaga mediasi seperti Partnership For Governance Reform (PGR) dapat memfasilitasi Non Government Organization (NGO) dan Civil Society Organization (CSO) untuk membangun

³ UNDP For Beginners, A Beginner's Guide To The United Nation Development Programme, Volume 2. Juni, 2005.

⁴ Pheni Chalid, *Otonomi Daerah*, Jakarta: Kemitraan, 2005, hal. 21.

kapasitas masyarakat agar dapat berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan.⁵UNDP adalah satu mitra pemerintah yang menyalurkan pendanaan dalam bentuk hibah.⁶ Dengan hadirnya UNDP dalam melaksanakan tujuan dari pada MDGs ini, serta melihat dengan pasti bukti kerja yang dilakukan UNDP dan bernarkah program yang dijalankan ini memberikan manfaat langsung tidak hanya kepada pemerintah setempat saja tetapi, seluruh masyarakat yang berada di Papua.

UNDP bekerjasama dengan pemerintah provinsi dalam rangka mewujudkan MDGs tersebut khususnya pada butir ke dua, yaitu pada bidang pendidikan. Sebagai contoh hadirnya UNDP memberi pengaruh dan dampak besar bagi dunia pendidikan khususnya di daerah-daerah terpencil di Papua yang kurang perhatian dari pemerintah pusat maupun lokal, bantuan oleh UNDP berupa pengajaran khusus dari tim kerja yang telah disiapkan secara khusus oleh UNDP untuk membantu dalam proses pembelajaran. Sejauh ini langkah tersebut telah membawa hasil yang signifikan, namun belum merata pembagian tersebut, masih ada beberapa daerah atau tempat yang belum di jangkau.

Adapun salah satu pencapaian pada pertengahan tahun 2009, Dinas Pengajaran dan Pendidikan Provinsi Papua telah mereplikasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ke 20 kabupaten dan menyelesaikan konsolidasi MBS ke dalam Rancangan Strategi (RESNTRA) dan Rencana Kerja (RENJA). Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Papua telah melaksanakan internalisasi MBS secara menyeluruh menjadi

⁵ Chalid,*Op, Cit*, hal 13.

⁶Badan perencanaan Pembangunan Nasional dan UNDP, *Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Hibah UNDP*,2009.Hal ,1.

program pemerintah daerah yang tentunya dibantu langsung oleh UNDP Papua. Hasilnya pola MBS pada fase 1 dan 2 terlebih pada fase 2 telah mencapai hasil yang optimal dalam memotivasi para pelaku pendidikan (*educational stakeholders*) untuk melaksanakan MBS dan merubah sistem kearah pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kecakapan hidup serta inklusif (Pendidikan untuk semua).⁷

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskanlah masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua dan UNDP selama periode 2009-2012 dalam rangka pencapaian tujuan MDGs di bidang pendidikan ?
2. Sejauhmana kerjasama tersebut telah membawa hasil-hasil positif dalam bidang pendidikan di Papua selamaperiode 2009-2012 ?

Seluruh rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas akan merujuk pada konsep dan teori yang ada dalam hubungan internasional serta akan dijawab dalam konteks hubungan internasional.

⁷<http://www.undp.or.id/papua/PDP%20Booklet%202009%20-%20Harmonisasi%20Dukungan%20Mitra%20Pembangunan%20Papua%206-2009.pdf> (diakses, 17 September 2013)

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab secara rinci mengenai peran UNDP dalam pembangunan demokrasi Indonesia di bidang Pendidikan dan Kemiskinan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan hubungan kerjasama antara UNDP dan Pemerintah Provinsi Papua berlangsung sejak periode 2009-2012 dalam pencapaian MDGs di bidang pendidikan.
2. Untuk mengetahui sejauhmana kerjasama tersebut telah membawa hasil-hasil positif di dalam bidang pendidikan di Papua selama periode 2009-2012.

Adapun pembatasan waktu yang digunakan adalah sejak kerjasama pemerintah Provinsi Papua dan UNDP dalam tahap ke dua pada tahun 2009-2012. Dengan adanya pembatasan waktu tersebut, peneliti dapat mengetahui hubungan kerjasama antara UNDP dan Pemerintah Provinsi Papua melalui program-program tersebut yang selama ini telah berlangsung selama 4 tahun dalam mendukung tujuan pembangunan di Papua.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Menambah kajian dalam ilmu hubungan internasional melalui program-program pada umumnya, dan secara khusus yang berkaitan dengan tujuan MDGs di bidang Pendidikan di Provinsi Papua.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang ada dan memberikan perspektif yang berbeda bagi peneliti, pelajar maupun pembaca pada umumnya dalam mengkaji berbagai bantuan dan keberhasilan yang dicapai UNDP dalam pencapaian tujuan MDGs di Papua dalam bidang Pendidikan.

1.5 Sistematika Penulisan

Jika seluruh tahapan ini telah selesai, maka hasil penelitian ini dan analisisnya akan ditulis secara utuh menjadi sebuah karya ilmiah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini berisi pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang penelitian mengenai topik yang akan diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan topik tersebut ke dalam rumusan masalah, tujuan, kegunaan, dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Berpikir

Kerangka ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Mulai dari uraian tentang pendekatan metodik, jenis dan sumber data, teknik mencari data, teknik pengumpulan dan teknik analisis data, serta hal-hal lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Bab III Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Mulai dari uraian tentang pendekatan metodik, jenis dan teknik sumber data, teknik mencari data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, serta hal-hal lain terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bagian ini berisi uraian dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. Hasil penelitian tersebut berupa kumpulan data yang kemudian dianalisa dengan teknik analisa yang telah dirumuskan sebelumnya dengan menggunakan data-data yang didapat penulis melalui berbagai sumber primer dan sekunder.

Bab V Kesimpulan

Bagian ini merupakan bagian penutup yang merupakan akhir dari laporan penelitian dan berisi kesimpulan yang ditarik penulis dari seluruh kegiatan penelitian dan penulisan laporan.